



Kombinasi untuk Penguatan Demokrasi: Kapasitas Lembaga Representasi Politik di Surakarta oleh PDI-P dan KOMPIP

Aris Setiawan Yodi¹✉

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 31 Maret 2017
Disetujui 17 Juni 2017
Dipublikasi 15 Juli 2017

Keywords:
*Democracy; Representation;
Surakarta; PDI-P
Surakarta; KOMPIP Solo*

Abstrak

Dinamika perkembangan demokratisasi di Indonesia telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Sejak kejatuhan era Orde Baru demokrasi cenderung stagnan bila tidak ingin dikatakan mengalami kemunduran. Berbagai lembaga demokrasi yang memiliki peran fundamental dalam mewakili kepentingan masyarakat untuk pengambilan kebijakan publik seperti lembaga representasi justru berada dalam titik nadir. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kapasitas representasi lembaga demokrasi yang bersifat formal maupun informal. Bagaimana kapasitas representasi lembaga representasi formal dan informal di Surakarta? PDI-P dan Kompip Solo merupakan dua lembaga demokrasi yang memiliki peran penting selama proses demokratisasi di Kota Surakarta. Pemetaan tersebut dapat dijadikan referensi untuk memulai langkah kerjasama di antara lembaga demokrasi yang saat ini semakin sulit terlihat di Indonesia. Melalui metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, penelitian ini berhasil memberikan jawaban bahwa kapasitas yang dimiliki oleh kedua lembaga representasi formal dan informal di Surakarta memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. PDI-P memiliki kapasitas yang bersifat sangat politis dengan kemampuan mobilisasi massanya dan kemampuan menguasai berbagai jabatan publik. Sementara itu, kapasitas yang dimiliki Kompip justru sangat teknokratik yang terlihat dari berbagai upaya pelatihan dan pemberdayaan warga yang sifatnya *hardskill* ataupun *softskill*. Hal tersebut menandakan apabila kedua lembaga dengan karakter yang berbeda tersebut dapat bekerjasama dengan baik, tentu saja cerita tentang proses demokratisasi di Indonesia yang terlihat memburuk dapat kembali menemukan harapannya.

Abstract

The dynamicity of democratization in Indonesia has been running for a long time since President Soeharto era's felt and tend to be stagnant if they not deemed declined. Some of democratic institutions that have fundamental role in representing society in public policy legislations are exactly in lower point. This research was conducted to map the representation of capacity for formal and informal institution of democracy. How the capacity for representation formal and informal representation institutions in Surakarta? Through the PDI-P and KOMPIP Solo, two important institution which role the democratization process in Surakarta. Hopefully, it can be used as a reference to start cooperation between democratic institutions. This research is intended to expose the collaboration between formal and informal institutions that has different strengths and weaknesses among others. PDI-P has settle form of political capacity and big masses. Meanwhile, the capacity of KOMPIP is very technocratic, which is seen from some training efforts and empowerment of citizens with hard skill and soft skill things. It indicates, if the two institutions with different characters are able to cooperate well, it will guarantee the democratic life in Indonesia.

Pendahuluan

Dalam periode yang cukup panjang, terhitung sejak runtuhnya rezim Orde Baru, pemerintah Indonesia telah mencoba membuka ruang-ruang baru. Ruang yang dimaksud adalah regulasi atau peraturan yang memungkinkan masyarakat turut ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal yang menjadi hakikat dari demokrasi. Sesuai dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh David Beetham “*demokrasi ialah kontrol rakyat atas urusan publik atas dasar kesetaraan politik*” (Beetham dalam Olle Tornquist, 2013:29). Penekanan terhadap peran serta masyarakat kemudian menjadi alasan bahwa pengelolaan pemerintahan tidaklah bisa hanya dilakukan terpusat oleh pemerintah tingkat nasional (pemerintah pusat) melainkan harus disebar ke tataran pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui peraturan UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan UU tersebut saat itu menandai penguatan sistem desentralisasi di Indonesia. Otonomi yang dimiliki daerah menjadi semakin luas, sehingga diharapkan lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat.

“Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sementara

itu, otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.” (Mahfud MD dalam Iswan Kaputra, dkk, 2013: 66).

Penggunaan konsep desentralisasi dalam mengelola hubungan pemerintah pusat dan daerah di tujukan agar tercapainya efektivitas pemerintahan dan terlaksananya demokrasi di atau dari bawah (Mariun dalam Josef RK, 2012). Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pada perkembangannya Pemerintah Indonesia dan DPR terus mengevaluasi UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 muncul untuk menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Terakhir, saat ini pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam konteks desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan justru lebih bertumpu pada pemerintahan di daerah. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan di aras lokal menjadi menarik untuk dicermati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, demokrasi mensyaratkan keterlibatan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan publik ataupun dalam hal kontrol terhadap pengelolaan urusan publik, maka menarik untuk melihat sejauh mana proses pelibatan masyarakat tersebut terjadi. Partai politik dan *Civil Society Organization* (CSO) dalam hal ini patut menjadi sorotan. Sebagai lembaga demokrasi yang tersemat fungsi representasi di dalamnya dan mendapatkan

momentum untuk tumbuh dan berkembang, khususnya setelah rezim otoriter Soeharto, partai politik dan CSO keduanya memiliki fungsi utama yaitu memperjuangkan rakyat dan mendorong terciptanya proses demokratisasi di masyarakat.

“Peningkatan secara dramatis kuantitas lembaga demokrasi mengindikasikan kembalinya modernisasi dan menguatnya demokrasi liberal sebagai gagasan penting dalam politik Indonesia. Demokrasi liberal memberi porsi dominan pada keberadaan institusi demokrasi baik di arena masyarakat politik (political society), maupun di arena masyarakat sipil (civil society). Argumennya, semakin banyak (semakin rapat tingkat kepadatan) lembaga demokrasi, semakin baik dampaknya bagi demokrasi (Dahl 1998)” (Cornelis Lay, 2015:1).

Tentu saja bila kita lihat dari segi kuantitas lembaga demokrasi yang ada di Indonesia, hal itu sudah terpenuhi. Namun demikian, apakah lembaga demokrasi yang telah banyak bermunculan di Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang sifatnya substansial seperti yang didefinisikan oleh David Beetham (menekankan kontrol rakyat atas urusan publik yang didasarkan kesetaraan politik)? Dijawab oleh Mietzner di tahun 2012, ia mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami stagnasi dalam kurun waktu 16 tahun. Kemunculan lembaga demokrasi secara massif tidak diiringi dengan realisasi dari pemaknaan demokrasi (Mietzner dalam Cornelis Lay, 2015). Singkatnya,

tersedianya institusi demokrasi yang sangat banyak, ternyata belum mampu menciptakan substansi dari demokrasi yang memudahkan masyarakat awam dapat mengakses dan mengontrol urusan publik.

“The ‘new’ democracies have fostered freedoms, election, and decentralisation but continue to suffer from poor governance, representation, and participation despite positive experiments such as participatory budgeting in parts of Latin America. Vulnerable people are frustrated by the lack of actual influence and sustained elitism. Politicians winning election often need to foster ethnic and religious loyalties, populism, clientelism, and the abuse of publik resources. Powerful groups and middle classes with limited ability to win elections tend to opt for privatisation and return partially to authoritarian governance.” (Tornquist, 2009: 3).

Penelitian ini menjadi penting sifatnya karena khususnya di Indonesia dalam kajian ilmu politik, pembahasan terkait konsep representasi sangatlah minim. Referensi yang ada sangatlah terbatas. Hal itu, menyebabkan sulitnya konsep esensi demokrasi dikembangkan. Namun demikian, berbicara representasi adalah konsekuensi logis dari pembahasan demokrasi perwakilan yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari temuan besar dari survey “baseline democracy” yang dilakukan oleh Power, Welfare, and Democracy (PWD)

Universitas Gadjah Mada dengan University of Oslo yang dilakukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis memperdalam temuan awal riset tersebut yang dilakukan di Kota Surakarta, Kota yang lebih dikenal dengan sebutan Kota “Solo” oleh masyarakat umum. Namun, penamaan resmi daerah tersebut hingga saat ini ialah menggunakan kata “Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder hasil penelitian PWD sebelumnya yang kemudian diperdalam melalui wawancara kepada narasumber–narasumber kunci yaitu pengurus kedua organisasi (PDI-P dan Kompip). Untuk memverifikasi data primer yang bersumber dari wawancara yang cenderung bersifat subjektif, penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi dengan pengamatan di lapangan.

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini ialah Bagaimana kapasitas lembaga representasi politik PDI-P dan Kompip di Kota Surakarta dalam proses pengelolaan urusan publik? Berpijak dari definisi demokrasi yang dikemukakan David Beetham dan kerangka pikir yang dikembangkan Olle Tornquist, pengukuran kapasitas dilakukan melalui lima variabel. Lima variabel tersebut yang kemudian dijadikan acuan untuk mengukur kapasitas lembaga representasi (PDI-P dan Kompip) di Surakarta ialah 1) ka-pasitas melakukan

inklusi, 2) kapasitas mem-peroleh legitimasi, 3) kapasitas melakukan politisasi isu dan menciptakan agenda, 4) ka-pasitas melakukan mobilisasi dan memba-ngun organisasi, 5) kapasitas untuk mening-katkan partisipasi dan representasi (Tornquist, 2013).

Surakarta yang dihuni PDI-P dan Kompip

Saat Indonesia yang masih bernama Hindia, konsep demokrasi saat itu belum dikenal oleh masyarakat pribumi. Namun, mereka telah paham bahwa mereka berhak untuk mengontrol isu publik ataupun kebijakan dari negara yang berdampak bagi masyarakat umum. Karakter Kota Surakarta yang sangat dinamis dilengkapi dengan unsur penduduk masyarakat Surakarta yang sangat plural juga menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu disebabkan oleh latar belakang suku penduduk Surakarta yang berasal dari tiga suku yaitu Arab, China, dan Jawa (Takashi Siraishi, 1997). Menarik kemudian bila itu dibahas dalam bingkai sistem demokrasi yang menghendaki pluralitas masyarakat.

Pemilihan PDI-P sebagai perwakilan dari lembaga representasi formal dan Kompip sebagai perwakilan lembaga representasi informal dilatar belakang oleh banyak hal khususnya terkait fakta dan data tentang dinamika serta pengaruh politik lembaga tersebut, khususnya di Surakarta. Pada perkembangannya pasca reformasi, PDI-P tampil sebagai partai yang besar dengan jumlah massa yang luar biasa di tataran akar rumput (*grassroot*), memenangi Pemilu di

tahun 1998 yang kemudian terulang di tahun 2014. PDI-P hanya mengalami titik terendahnya di tahun 2009 pada saat itu hanya menempati peringkat ketiga di bawah Partai Demokrat dan Golkar dalam hal perolehan suara secara nasional (kpu.go.id, 2016). Dalam konteks Surakarta, selain berkaca dari hasil Pemilu legislatif, dominasi PDI-P sangat terasa melihat pasca reformasi 1998, terpilihnya Wali Kota Surakarta yang selalu berasal dari PDI-P. Slamet Suryanto mengawali dominasi tersebut di tahun 1999 ketika pemilihan kepala daerah masih melalui DPRD dilanjutkan oleh Joko Widodo di tahun 2005 dan dilanjutkan oleh FX Rudyatmo hingga saat ini. Semua Wali Kota tersebut berasal dari partai politik yang sama yaitu PDI-P. (kpu.go.id, 2016). Sedangkan untuk konteks dominasi PDI-P di dalam lembaga legislatif, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1 Perolehan Suara PDI-P di Daerah Pemilihan Kota Surakarta

Perolehan Suara	Tahun 2004	Tahun 2009	Tahun 2014
DPRD Kota Solo	35,95%	30,1%	51,6%
DPRD Provinsi Jawa Tengah	35,7%	34,2%	57,4%
DPR RI	36,1%	27,2%	58,3%
Rerata	35,9%	30,5%	55,8%

Sumber: KPU Surakarta, 2016. Data diolah dari Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks pemilihan Kompip dalam penelitian ini didasari fakta bahwa Kompip merupakan organisasi masyarakat pertama di Surakarta yang pada periode awal reformasi bertujuan untuk

pemberdayaan institusi publik. (Cornelis Lay dan Pratikno, 2011). Kompip yang terbentuk dari tiga NGO (*Non Government Organization*) yakni Gita Pertiwi, Leskap, dan Inres yang didukung oleh lembaga donor yaitu Ford Foundation saat itu fokus terhadap penguatan *participatory planning* yang sedang digencarkan oleh pemerintah Surakarta. Pada perkembangannya hingga saat ini, Kompip lebih cenderung concern terhadap isu-isu demokrasi yang berkaitan dengan kaum marginal dan kaum miskin kota. Besarnya peran Kompip sebagai CSO di Surakarta dapat pula dilihat dari kacamata keterlibatan anggotanya dalam jabatan-jabatan publik formal. Jabatan-jabatan tersebut seperti komisioner KPU Daerah (Komisioner KPU), Panitia Pengawas Pemilu Daerah, bahkan menjadi legislator di daerah (Akbarudin, 2016).

Melihat Demokrasi Substantif melalui Kapasitas Lembaga Representasi

Dari penjelasan–penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana kapasitas lembaga representasi politik PDI-P dan Kompip di Kota Surakarta dalam proses pengelolaan urusan publik? Pertanyaan tersebut akan mencoba mengantarkan riset ini untuk mencapai tujuan memperoleh informasi-informasi dasar seperti; 1) sejauh mana kapasitas lembaga representasi politik PDIP dan Kompip dalam proses pengelolaan urusan publik terkait kaum marginal di

Surakarta, 2) Mengetahui pola relasi kuasa antara masyarakat dengan institusi representasi politik PDI-P dan Kompip di Surakarta dalam kaitannya dengan pengelolaan urusan publik di Surakarta, 3) Mengetahui pola hubungan yang terbangun di antara lembaga representasi politik formal (PDI-P) dan informal (Kompip) dalam melakukan pengelolaan urusan publik terkait kaum marginal di Kota Surakarta. Tentu saja dari pertanyaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, alur pemikiran yang dibangun ialah mengukur sejauh mana kapasitas lembaga representasi politik di Surakarta dalam prosesnya mengelola urusan publik (*public affairs*) terkait dengan kepentingan kaum marginal.

Lembaga representasi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang berfungsi menghadirkan sesuatu ataupun seseorang dalam bentuk individu ataupun kelompok dalam suatu konteks politik tertentu. Pengertian tersebut lebih umum dipahami sebagai praktek mewakili seseorang, kelompok, ataupun suatu kepentingan tertentu dalam suatu konteks politik tertentu. Pada umumnya hal ini terjadi dalam pengelolaan suatu urusan publik. Pemahaman tersebut tidak terlepas dari definisi klasik tentang representasi yang diperkenalkan oleh Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation*.

“Pitkin menunjukkan bahwa konsep representasi berasal dari bahasa latin, representare, yang berarti menjamin sesuatu atau seseorang hadir secara

literal, fisik dan langsung. Makna literal itu dikembangkan Pitkin menjadi makna representasi secara nonliteral, tetapi pada prinsipnya frasa “menjamin” tetap menjadi makna inti representasi. Secara nonliteral, representasi ditunjukkan dengan kehadiran nonfisik, dimana orang-orang yang diwakili (represented) hadir diwakili oleh orang-orang yang mewakili (representatives). Kehadiran orang-orang yang diwakili (represented) itu “dijamin” hadir secara artifisial dengan tindakan representasi yang dijalankan oleh yang mewakili (representatives)” (Pitkin dalam Abdur Rozaki, 2014: 20).

Dari definisi tersebut, penelitian ini coba melihat kedua lembaga representasi tersebut melalui skema atau model representasi yang dikemukakan Olle Tornquist. Model ini akan membantu memetakan posisi kedua lembaga representasi yang dipilih yaitu partai politik PDI-P dan juga Kompip untuk mengetahui alur dan proses dalam menyalurkan aspirasi/

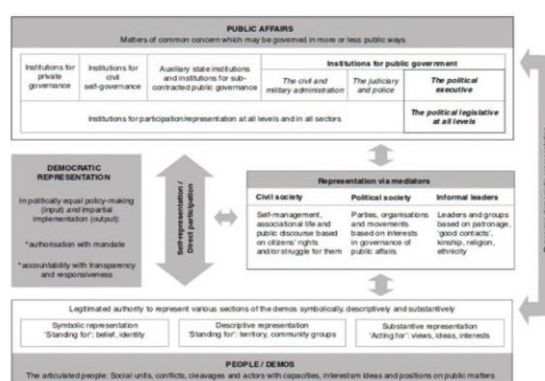


Figure 1.2 Integrated framework for the study of popular democratic representation.

kepentingan kepada institusi pengelola urusan publik. Model yang akan diberikan ialah model representasi politik yang diperkenalkan

oleh Olle Tornquist ditahun 2009. (Tornquist, 2013:64).

Pola Representasi Politik dalam Pengelolaan Urusan Publik

Institusi representasi seperti yang digambarkan Olle Tornquist dalam bagannya diletakkan dibagian tengah bagan. *Representations via mediators* dan juga *self-representation/direct participation* dianggap sebagai institusi representasi yang idealnya mewakili masyarakat (*demos*) dibagian bawah bagan dan menyampaikan isu/persoalan yang dianggap sebagai persoalan publik oleh masyarakat kepada institusi pengelola urusan publik yang terletak di bagian atas bagan. Institusi pengelola urusan publik diletakkan di bagian atas bagan. Hal ini tentu akan membantu kita dalam memahami proses demokrasi berbasis representasi. Melalui bagan tersebut kita dapat memahami bagaimana seharusnya sebuah kebijakan publik atau program pemerintah dibuat. Idealnya, kebijakan publik atau program pemerintah yang dibuat dan diberlakukan oleh Pemerintah daerah adalah agregasi dari kepentingan masyarakat/*demos*. Dalam hal ini lembaga intermediari seperti yang tergambar di bagan berada di tengah berperan sangat penting untuk menghubungkan kedua hal tersebut. Kontekstualisasi dalam penelitian ini, peran tersebut diidentifikasi diemban oleh kedua lembaga demokrasi yaitu PDI-P dan Kompip.

Dalam konteks penelitian ini, yang dilakukan ialah mengukur kapasitas kedua lembaga representasi yaitu PDI-P dan Kompip. Dari pengukuran tersebut, penelitian ini akan melihat sejauh mana kapasitas lembaga representasi sebagai aktor demokrasi dalam mengelola urusan publik melalui variabel-variabel yang menentukan apakah lembaga representasi tersebut memiliki kapasitas untuk memanfaatkan institusi-institusi demokrasi yang akan mendorong terciptanya proses demokratisasi yang substantif. Asumsinya, semakin lembaga representasi memiliki kapasitas untuk memanfaatkan institusi-institusi demokrasi yang ada, maka bisa dikatakan lembaga tersebut akan semakin baik dalam melakukan proses pengelolaan urusan publik. Olle Tornquist berpendapat bahwa pembangunan institusi demokrasi yang ada selama ini hanya dilakukan oleh kalangan elit politik atau ekonomi sehingga institusi yang ada tidak memperjuangkan atau mementingkan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, penting bagi lembaga demokrasi berusaha menciptakan inklusivitas dalam proses politik. Tentu saja diperlukan variabel-variabel yang kemudian digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut yang diikuti dengan indikator-indikatornya dapat dilihat lebih mendetail melalui tabel berikut.

Tabel 2.1

No	Variabel	Indikator
1.	Kapasitas Melakukan Inklusi	1. Cara apa yang dilakukan terkait pelibatan orang awam di dalam proses politik. 2. Cara yang dilakukan dalam mengatasi eksklusi politik. 3. Relasi antar aktor demokrasi (dalam hal ini ditekankan antara PDI-P Surakarta dan Kompip) apakah inklusif satu sama lain ataukah tidak.
2.	Kapasitas Memperoleh Legitimasi	Apa saja jenis sumber atau basis kekuasaan kedua lembaga representasi yang dimaksud (PDI-P dan Kompip).
3.	Kapasitas Melakukan Politisasi dan Menciptakan Agenda	1. Metode apa yang digunakan dalam melakukan politisasi isu prioritas menjadi agenda politik. 2. Metode dalam membingkai isu-isu prioritas (<i>framing</i>). Apakah framing yang dilakukan bersifat tunggal ataukah strategis (<i>general</i>).
4.	Kapasitas untuk Melakukan Mobilisasi dan Membangun Organisasi	Metode apa yang digunakan oleh kedua lembaga representasi terkait dalam melakukan mobilisasi dan membangun organisasi
5.	Kapasitas untuk Meningkatkan Partisipasi dan Representasi	Institusi pengelola urusan publik apa saja yang biasanya digunakan dalam menghadapi setiap persoalan publik.

Kerangka pemikiran seperti yang telah dijelaskan tersebut diadopsi dari riset “*baseline democracy*” yang dilakukan oleh Power Welfare and Democracy (PWD UGM) dengan University of Oslo (UIO). Kerangka teori dan pemikiran yang digunakan dalam penelitian tersebut relevan untuk digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan melihat kapasitas lembaga demokrasi, khususnya representasi dalam konteks demokrasi substansial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain

penelitian studi kasus. Pemilihan metode tersebut tentu saja ditujukan untuk mempermudah menjawab pertanyaan penelitian dan juga tujuan yang telah dirumuskan. Metode penelitian kualitatif membantu peneliti sosial untuk lebih mengembangkan hal yang diteliti dan tidak terpatok dan terkungkung dalam standar-standar baku yang bersifat numerik. Selanjutnya, dengan desain penelitian studi kasus, data terkait PDI-P dan Kompip di Surakarta akan diperoleh dengan lebih rinci dan mendalam sifatnya. Tentu hal tersebut, akan sangat membantu peneliti dalam menginterpretasikan data melalui kerangka pemikiran yang telah disusun. Pengukuran kapasitas lembaga representasi publik tersebut dengan lima variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan melakukan wawancara mendalam dengan nara sumber. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan sifatnya melengkapi data sekunder yang telah didapat melalui penelitian PWD sebelumnya tentang *baseline democracy* di Surakarta. Wawancara dilakukan dengan beberapa pengurus PDI-P Kota Surakarta dan juga pengurus Kompip. Keunggulan data primer yang didapat dari penggunaan teknik pengumpulan data melalui wawancara tentu saja disertai limitasi dari kecenderungan subjektivitas dari nara sumber tersebut. Oleh sebab itu, kami mengkombinasikannya dengan memperoleh data melalui analisis dokumen/studi literatur terkait dan observasi langsung.

Guna memanfaatkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data tersebut dengan cara menginterpretasikannya dan juga menganalisis wacana yang muncul dalam data yang kami temukan khususnya terkait dengan kapasitas lembaga representasi politik dalam pengelolaan urusan publik di Surakarta.

Menakar Kapasitas PDI-P dan Kom-pip Sebagai Lembaga Representasi di Surakarta

Selanjutnya, dalam penelitian ini penting untuk melihat kapasitas dari PDI-P dan Kompip sebagai lembaga representasi di Surakarta dan perannya dalam pengelolaan urusan publik.

Kapasitas Melakukan Inklusi

Cara yang digunakan terkait pelibatan orang awam di dalam proses politik

Berpijak dari temuan riset terdahulu terkait terdapat tiga cara yang dominan digunakan yaitu inklusi politik, inklusi ekonomi, dan inklusi sosial budaya, cara yang dilakukan lembaga representasi formal PDI-P cenderung inklusi dalam bidang sosial budaya dan juga inklusi politik. Inklusi sosial dan budaya lebih dipilih sebagai metode untuk melibatkan masyarakat dalam proses politik di Surakarta, khususnya dalam pengelolaan urusan publik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Putut Gunawan, anggota DPRD Surakarta Fraksi PDI-P yang juga menjabat

sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu di struktur kepengurusan PDI-P Kota Surakarta, bahwa interaksi langsung antara kader di tingkat paling rendah yaitu anak ranting (Rukun Warga/RW) menjadi hal yang selalu dikedepankan (Putut Gunawan, wawancara, tanggal 8 April 2016).

Dalam konteks lembaga representasi informal seperti yang diperankan oleh Kompip Solo, metode yang digunakan untuk melibatkan masyarakat ke dalam proses politik cenderung merata jika dikaitkan dengan tiga jenis inklusi yang telah dijelaskan sebelumnya seperti inklusi politik, inklusi ekonomi, dan juga inklusi sosial dan budaya. Ketiga inklusi tersebut dilakukan dengan cukup berimbang dalam kerangka advokasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat marginal, atau yang kerap dikatakan oleh pengurus Kompip Solo sebagai kaum miskin Kota. Advokasi dan pemberdayaan ialah logika utama yang digunakan oleh Kompip Solo (Akbarudin, wawancara, tanggal 1 April 2016).

Cara yang Dilakukan untuk Mengatasi Eksklusi Politik

Dari tiga cara yang dominan dilakukan oleh aktor demokrasi di Surakarta dalam mengatasi eksklusi politik yaitu aksi persuasi, masa aksi, dan juga menggunakan media informasi atau wacana publik, cara yang dilakukan oleh PDI-P Surakarta cenderung melalui aksi-aksi persuasi yang dilakukan oleh kader-kader di tingkatan akar

rumpun. Aksi persuasi tersebut diwujudkan dengan ajakan-ajakan para pemimpin di tingkat RW yang merupakan kader PDI-P untuk turut aktif dalam kegiatan di lingkungannya ataupun membahas persoalan-persoalan publik. Selain persuasi, melakukan aksi yang sifatnya advokatif kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan publik Pemkot Surakarta ataupun dipersulit dalam mengakses pelayanan birokrasi Pemkot Solo seperti urusan tanah, dll. Aksi tersebut juga dilakukan di media sosial oleh kader-kader PDI-P dalam rangka mengatasi eksklusi politik (Putut Gunawan, wawancara, tanggal 8 April 2016).

Sementara dalam konteks Kompip, cara mengatasi eksklusi politik cenderung memanfaatkan media informasi yang kemudian dibarengi dengan pemanfaatan jaringan yang dimiliki. Dalam memanfaatkan media informasi, Kompip kerap kali menulis artikel atau opini di dalam media massa baik level nasional ataupun lokal. Tidak hanya itu, terkadang Kompip melakukan konferensi pers dengan media yang juga melibatkan masyarakat terdampak terkait suatu urusan ataupun kebijakan publik. (Eko, wawancara, 12 April 2016).

Relasi Antar Aktor Demokrasi di Surakarta

Dalam hal ini, PDI-P Kota Surakarta melalui Pengurusnya yang sekaligus anggota DPRD Kota Surakarta mengaku bersifat terbuka terhadap lembaga demokrasi lainnya di Surakarta baik dengan partai politik, LSM,

ataupun lembaga demokrasi lainnya. Hal itu kemudian yang juga dikonfirmasi oleh Eko sebagai Direktur Kompip Solo yang mengatakan kerap melakukan komunikasi dengan kader Partai PDIP khususnya ketika sedang dalam situasi Pemerintah Kota Solo ingin mengimplementasikan suatu Kebijakan Publik yang dinilai berpengaruh terhadap kaum miskin kota. Contohnya pada saat relokasi PKL Banjarsari. Kerjasama yang terjalin diantara para aktor demokrasi di Surakarta dapat tercermin dengan apa yang dilakukan oleh Kompip. Dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan pengurus Kompip, maka jika dilihat derajat inklusivitas Kompip terhadap lembaga demokrasi lainnya dalam pengelolaan suatu masalah ataupun urusan publik, dapat dikatakan Kompip bersifat inklusif. Hal ini dapat kita lihat dari kegiatannya yang kerap kali berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, Komnas HAM, berbagai CSO, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya ketika mengadvokasi atau memperjuangkan suatu urusan publik.

Kapasitas Memperoleh Legitimasi

Basis Legitimasi

Jika diamati dari pengelompokan empat basis utama para aktor demokrasi di Surakarta dalam memperoleh legitimasi yaitu sumber daya ekonomi, hubungan pengetahuan, atau informasi dan tekanan maka jika kita kontekskan dengan PDI-P dengan penjelasan yang ada kita dapat menggolongkan bahwa hubungan sosial

menjadi basis utama PDI-P dalam memperoleh legitimasi.

Hal ini tentu saja terbentuk atau diperoleh melalui interaksi partai politik yang menyentuh hingga level paling rendah dalam entitas masyarakat (RT/RW) melalui tokoh-tokoh masyarakat. Dalam konteks komunitas pekerjaan, para kader juga didorong untuk menjadi pemimpin dalam berbagai komunitas dan paguyuban, misalnya paguyuban pedagang pasar, kelompok buruh, dll. (Putut Gunawan, wawancara, tanggal 8 April 2016).

Jika kita melihat Kompip dalam memperoleh legitimasi, basis ilmu pengetahuan menjadi yang utama. Basis pengetahuan dalam hal ini dijadikan dasar berpijak Kompip Solo untuk menjalin hubungan sosial yang kuat dikalangan masyarakat Surakarta, khususnya kaum marginal atau yang disebut kaum miskin kota. Baik pengetahuan akademis maupun nonakademis yang dimiliki para anggota Kompip Solo diaplikasikan untuk mendampingi sekaligus mengadvokasikan kaum marginal yang diwakili Kompip Solo guna menghadapi persoalan-persoalan publik yang dihadapi.

Kapasitas Melakukan Politisasi dan Menciptakan Agenda

Metode yang dilakukan dalam melakukan politisasi isu atau menciptakan agenda

Temuan dari survei “*baseline democracy*” PWD terkonfirmasi melalui penelitian ini. Temuan yang memberikan

informasi bahwa menjadi aktif di partai politik kemudian meletakkan isu prioritas menjadi agenda setting terjawab oleh PDI-P di Surakarta. Hal itu semakin jelas jika kita mengetahui bahwa PDI-P di Surakarta sangat mendominasi baik di legislatif maupun di eksekutif. Dalam gedung DPRD misalnya, kader PDI-P berhasil menempati total 24 kursi dari total kursi anggota DPRD. Itu berarti jumlah anggota DPRD yang berasal dari PDI-P melebihi prosentase 50%. (www.surakarta.go.id, diakses tanggal 8 Maret 2016) tentu sangat mudah bagi PDI-P memuluskan kebijakan sesuai dengan haluan partai karena bila saja dilakukan mekanisme voting dalam suatu agenda penentuan kebijakan di DPRD, fraksi PDI-P akan menang.

Sementara yang dilakukan Kompip selain aktif di kelompok-kelompok kepentingan, penggunaan media menjadi hal yang sangat ditekankan sebagai pintu untuk menjalin kerjasama dengan para stakeholders. Agenda ini berhasil mencapai tujuannya pada saat keberhasilan merelokasi PKL Banjarsari dimana Kompip berhasil menciptakan tekanan pada Pemerintah Kota Surakarta. (Eko, wawancara, tanggal 12 April 2016).

Jenis framing yang dilakukan untuk mempromosikan isu menjadi agenda politik

Terdapat dua jenis framing yang dilakukan oleh para aktor demokrasi, jenis yang pertama yaitu jenis framing yang bersifat tunggal sedangkan yang kedua yaitu bersifat

strategis. Tentu saja jenis framing yang bersifat strategis terlihat lebih memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan publik. Hal itu disebabkan, jenis framing strategis dapat merangkul lebih banyak aliansi-aliansi dan kelompok-kelompok di masyarakat dibandingkan dengan jenis framing yang bersifat tunggal.

Melalui informasi yang diperoleh dari pengurus PDI-P Kota Surakarta, PDI-P cenderung menggunakan jenis framing yang bersifat strategis. Hal ini juga diakui oleh Lembaga representasi informal yang dikemukakan oleh Kompip.

Kapasitas Dalam Melakukan Mobilisasi dan Membangun Organisasi

Metode apa yang digunakan dalam melakukan mobilisasi dan membangun organisasi

Dalam indikator metode mobilisasi yang dilakukan oleh aktor demokrasi di Surakarta, dalam konteks PDI-P, sesuai dengan temuan riset PWD “*baseline democracy*” yang mengatakan kecenderungan umum aktor demokrasi melakukan mobilisasi dengan membangun dan mengembangkan populisme. Hal itu dinilai sesuai dengan selera masyarakat Indonesia secara umum saat ini.

Populisme sendiri dapat dimaknai sebagai keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan kepada elit politik ataupun pemerintah (Budhiarto Shambazy, Kompas 22 Februari 2016). Keberpihakan tersebut dapat

terlihat dari pola komunikasi, tataran ide, hingga kebijakan politik.

“Raadt, Hollanders, dan Krouwel (2004) mencatat, populisme setidaknya secara wacana ideologis menolak kemapanan dan politik yang monoton. Kendatipun tidak anti demokrasi atau anti politik, politik populis membawa-bawa “rakyat” dan “anti kemapanan”, dan menyambungkannya dengan kekuasaan” (Alfan Alfian, Kompas 9 April 2014).

Populisme secara nyata dapat dilihat sebagai upaya penyerdahanaan masalah publik yang dihadapi. dimana terkadang penyelesaian masalah tersebut tidak perlu melalui mekanisme politik dan birokratis yang rumit. Populisme muncul ketika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik formal di masyarakat menurun. Proses politik yang sangat teknokratis dan birokratis dianggap bertele tele dan tidak berpihak terhadap masyarakat.

“Merujuk Laclau (2005), praktik populis muncul dari kegagalan lembaga-lembaga sosial dan politik ketika meningkatnya tuntutan tidak disertai oleh meningkatnya ketidakmampuan sistem kelembagaan untuk menyerap mereka. Dari sini, kita bisa mencatat populisme hadir ketika orang relatif tidak percaya pada representasi kelembagaan formal yang seolah tidak mampu berbuat apa-apa” (Alfan Alfian, Kompas 9 April 2014).

Contoh mutakhir praktek populisme di Indonesia ialah hal yang dilakukan oleh Joko Widodo. Ia berhasil memenangkan beberapa proses politik elektoral di ranah

provinsi (Gubernur DKI Jakarta) di 2012 dan nasional (Presiden) di 2014. Gaya kepemimpinan serta kebijakan yang ditawarkan seolah anti kemapanan, sehingga masyarakat tertarik. Masyarakat merasa Jokowi ialah representasi masyarakat Indonesia yang sederhana, bukan elit dengan gaya dan prosedur kepemimpinannya yang kaku. Pola demikian yang memaksa banyak lembaga atau pihak politik menerapkan cara-cara populis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat saat ini.

Dalam konteks PDI-P di Surakarta, pihaknya pun mengamini pandangan tersebut. Membangun populisme yang dilakukan oleh PDI-P biasanya dilakukan oleh kader-kader yang menduduki jabatan-jabatan politis. Hal itu disebabkan dengan membangun populisme, secara tidak langsung mendekatkan partai politik dengan masyarakat. Hal itu diwujudkan oleh Wali kota Surakarta yang merupakan kader PDI-P dengan aksi “*blusukan*” yang dilakukan dengan intensitas yang tinggi, aksi tersebut setidaknya bisa dilakukan sehari lima kali dan itu pun tidak termasuk saat hari libur misalnya di “*car free day*” (www.solo-tribunnews.com, diakses tanggal 15 April 2016). Kesepakatan membangun populisme sebagai metode terbaik dalam membangun organisasi juga diamini oleh Kompip yang memandang populisme ialah “menu andalan” dalam meja pemerintahan demo-krasi di Indonesia pada saat ini. (Akbarudin, wawancara, tanggal 2 April 2016).

Kapasitas Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Representasi

Institusi pengelola urusan publik yang biasanya digunakan dalam menghadapi setiap persoalan publik

Pengamatan peneliti terhadap PDI-P yang juga didapat melalui hasil wawancara dengan pengurus PDI-P Kota Surakarta memberikan gambaran bahwa PDI-P cenderung menyelesaikan masalah publik yang dihadapi kepada lembaga eksekutif. Dalam hal ini wali kota memiliki peran yang sangat kuat dan dinilai berpengaruh. Hal tersebut tentu saja dinilai berpengaruh karena wali kota dapat membuat suatu kebijakan publik untuk menjawab permasalahan yang ada. Penyelesaian yang cenderung melalui lembaga eksekutif dapat kita mengerti tidak terlepas dari walikota dan wakil wali kota Surakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari PDI-P. Melalui metode tersebut, PDI-P tidak memiliki kendala akses komunikasi yang berarti jika menyelesaikan masalah publik.

Berbeda dengan PDI-P, Kompip lebih cenderung menyelesaikan permasalahan melalui organisasi mandiri ataupun komisi-komisi yang ada dengan melakukan pemberdayaan kepada kaum marginal agar dapat mengakses berbagai organisasi tersebut. Penyelesaian urusan publik yang diketahui melalui proses pengaduan masyarakat langsung ke Kompip biasanya ditanggapi dengan mengkaji persoalan tersebut kemudian diambil langkah yaitu pendampingan untuk

menghadap DPRD/Wali Kota, atau bila permasalahan menyangkut HAM dihubungkan dengan Komnas terkait, atau bila permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum dihubungkan dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) ataupun pengacara yang memiliki jaringan dengan Kompip. Namun, penekanannya dalam hal ini Kompip lebih berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri dengan “*upgrading*” kemampuan teknokratis masyarakat.

PDI-P dan Kompip “Perbedaan Yang Saling Melengkapi”

Setelah kita dapat memetakan kecenderungan kapasitas representasi dalam pengelolaan urusan public diantara PDI-P dan Kompip di Surakarta, menarik kemudian apabila kita mengaitkannya satu sama lain. Kekurangan dan kelebihan yang sebenarnya bisa saling diatasi oleh keduanya apabila terbangun sistem interaksi yang baik.

Kapasitas Dalam Melakukan Inklusi

Dalam variabel ini yaitu kapasitas lembaga representasi dalam melakukan inklusi masing-masing lembaga baik itu PDI-P dan juga Kompip memiliki keunggulan yang berbeda di setiap indikatornya. Seperti yang telah diketahui, dalam variabel ini terdapat tiga indikator yaitu, metode yang digunakan dalam melibatkan masyarakat awam dalam proses politik, cara yang digunakan dalam mengatasi eksklusi politik dan

relasi di antara aktor demokrasi lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya melalui temuan data, inklusi yang cenderung digunakan oleh PDI-P ialah inklusi dalam hal sosial budaya melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Untuk inklusi dalam bidang politik, PDI-P cenderung melibatkan masyarakat dalam tataran politik formal seperti ajang Pemilu. Walau dalam beberapa kesempatan terdapat masyarakat awam yang direkrut untuk kemudian menjadi Calon Legislatif oleh PDI-P, pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat mobilisasi dengan nuansa kampanye.

Metode yang digunakan PDI-P jelas berbeda dengan inklusi yang dilakukan oleh Kompip. Sebagai sebuah lembaga representasi informal yang tidak memiliki pola menduduki jabatan publik seperti partai politik, maka yang dilakukan cenderung dengan pemberdayaan dan advokasi suatu kelompok masyarakat ketika menghadapi suatu persoalan publik tertentu. Pemberdayaan tersebut merupakan hal yang positif jika dikontekskan dengan upaya untuk menciptakan kesetaraan politik. Dengan demikian, akses untuk mengontrol kebijakan atau urusan publik tidak semata-mata dimiliki oleh kaum elit atau kaum yang berpendidikan, melainkan semua kalangan masyarakat. Pemberdayaan sekaligus pendidikan politik bagi semua masyarakat tentu diperlukan untuk memberdayakan institusi publik yang ada. Artinya, dengan masyarakat yang memiliki kapasitas yang memadai dalam proses

ataupun kontrol pengelolaan urusan publik maka masyarakat akan memanfaatkan institusi-institusi publik yang ada. Metode tersebut kemudian dipilih untuk mencapai tujuan yaitu member-dayakan institusi publik yang ada. Dalam konteks Surakarta, tentu saja institusi publik yang dimaksud ialah institusi publik di Kota Surakarta.

Kita dapat memahami bahwa dalam konteks menciptakan kontrol publik berdasarkan kesetaraan politik, masyarakat awam dituntut untuk berdaya atau memiliki kapasitas dalam bidang politik. Usaha yang dilakukan oleh Kompip seperti proses advokasi, melakukan pelatihan menyusun rekomendasi kebijakan, pelatihan dalam mengemukakan pendapat di muka umum kepada kaum marginal yang dipandang kerap terpinggirkan di Kota Surakarta cenderung lebih baik dalam membangun demokratisasi dibandingkan dengan PDI-P. Tak bisa kita pungkiri inklusi politik melalui pendidikan oleh partai politik cenderung semakin sulit ditemui apabila kita tidak ingin menyebutnya tak dilakukan. Fenomena relokasi pedagang di Banjarsari tanpa gejolak yang merupakan dampak dari terbukanya ruang dialog antara pemerintah kota dengan masyarakat dapat menjadi potret kerja sama antara lembaga representasi formal dan informal dapat membangun demokrasi lokal di Surakarta.

Kapasitas Memperoleh Legitimasi

Dari data yang ditemui kedua lembaga representasi dalam penelitian ini

yaitu PDI-P dan Kompip memiliki basis utama dalam memperoleh legitimasi yaitu hubungan sosial yang terbangun kuat. Secara sederhana kita dapat menyebutkan PDI-P memperolehnya dari kader-kadernya yang tersebar menduduki jabatan RW (Rukun Warga) sedangkan Kompip lebih karena kedekatannya dengan proses pendampingan terhadap kaum marginal di Kota Surakarta. Selain itu, kedua lembaga percaya bahwa menjadi populer dan menjadi pemimpin yang kharismatik di Surakarta merupakan cara yang efektif untuk menjadi pemimpin yang terlegitimasi dan otoritatif. Dikenal oleh kalangan masyarakat dan terekspose media dalam hal ini menjadi penting.

Dengan demikian secara sederhana kita dapat memahami bahwa dalam hal ini PDI-P lebih unggul dibandingkan Kompip. Representasi pemimpin yang kharismatik dapat direpresentasikan secara mudah dengan melihat simbol seperti Wali kota Surakarta. Secara langsung rakyat Surakarta menilai bahwa Wali kota Surakarta memiliki wewenang atau otoritas untuk mengatur Kota Surakarta. Hal ini kemudian yang dalam beberapa hal sulit dilakukan oleh Kompip, walaupun dalam beberapa kesempatan anggota dari Kompip mulai terjun ke tataran politik formal seperti menjadi komisioner KPU. Transformasi basis legitimasi lembaga representasi formal seperti PDI-P dalam hal ini lebih berhasil menjadikannya sebagai pemimpin yang otoritatif. Sederhananya, cukup sulit dalam mempengaruhi kebijakan

publik atau urusan publik pada konteks demokrasi saat ini ketika berada di luar pemerintahan. Usaha keras harus dilakukan oleh Kompip dalam hal ini seperti berjejaring.

Kapasitas Melakukan Politisasi dan Menciptakan Agenda

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel ini akan melihat sejauh mana lembaga representasi memiliki kapasitas untuk menjadikan isu prioritasnya sebagai isu publik. Baik PDI-P dan juga Kompip mengakui bahwa cenderung memilih untuk menggunakan jenis framing yang bersifat isu strategis atau bisa kita pahami secara sederhana sebagai isu yang bukan tunggal dan mencakup banyak kalangan. Semakin luas cakupan isu tersebut maka semakin mendapatkan dukungan atau perhatian dari banyak kalangan masyarakat dan akan berdampak baik bagi perkembangan demokratisasi masyarakat.

“Specific issues and interest and targeted measures may, for instance, shape specific constituencies such as workers, landless peasant or certain middle classes. But more general measures may facilitate broader alliances and majorities as well as long-term strategies, and possibly more feasible national policies too” (Tornquist, 2013).

Selain dalam hal pemilihan jenis framing yang keduanya memiliki pandangan yang sama, kedua lembaga representasi tersebut juga berpandangan sama tentang pemanfaatan kemajuan pesat di bidang media.

Keduanya sepakat bahwa penggunaan media baik media cetak maupun elektronik merupakan cara efektif yang dapat digunakan untuk menghem-buskan isu ke publik yang kemudian akan berkaitan dengan politisasi isu yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Namun demikian, ketika kita coba menilai lebih jauh kekuatan politisasi isu dari kedua lembaga tersebut, PDI-P dalam hal ini cenderung lebih memiliki kapasitas dibandingkan oleh Kompip. Tentu saja hal itu, berkaitan dengan kepanjangan tangan PDI-P di Surakarta yang mendominasi baik di lembaga eksekutif ataupun legislatif. Baik wali kota maupun wakil wali kota keduanya berasal dari PDI-P. Begitupun di ruang legislatif, lebih dari 50 persen anggota DPRD Surakarta berasal dari PDI-P. Proses penciptaan agenda dan politisasi isu yang diinisiasi oleh DPRD ataupun eksekutif akan berjalan mulus, terlebih Wali kota Surakarta juga menjabat sebagai Ketua PDI-P Kota Surakarta. Walaupun dalam proses politisasi isu menggunakan media Kompip juga cukup gencar melalui media massa maupun elektronik, tetapi dengan sumber daya yang besar baik ekonomi ataupun otoritas formal, secara tidak langsung membuat PDI-P memiliki kapasitas dalam menghembuskan isu prioritasnya guna dijadikan isu publik masyarakat Surakarta.

Pada satu sisi, ini merupakan hal yang positif, namun di sisi lain proses ini dapat menjadi pendorong terjadinya kemunduran demokratisasi di Kota Surakarta bila politisasi

isu yang dikembangkan oleh PDI-P tidak dikontrol atau diimbangi oleh masyarakat. Lembaga representasi informal yang dalam argumen Olle Tornquist disebut sebagai lembaga alternatif menjadi penting perannya. Dalam hal ini Kompip dapat berperan sebagai trigger kontrol dari elemen masyarakat khususnya kaum marginal terhadap politisasi isu yang ada. Kapasitas Kompip terasa dalam hal ini. Sehingga lagi-lagi guna perkembangan demokrasi lokal kedua lembaga representasi seharusnya dapat menjalin kerjasama atau hubungan yang jika dinilai keduanya akan saling melengkapi.

Kapasitas Melakukan Mobilisasi dan Membangun Organisasi

Variabel ini akan membantu melihat sejauh mana kemampuan mobilisasi dan membangun organisasi dari kedua lembaga representasi yaitu PDI-P dan Kompip. Data yang diperoleh di lapangan memberikan gambaran bahwa keduanya mengakui bahwa metode yang cenderung dirasa tepat untuk masyarakat Kota Surakarta sampai saat ini ialah dengan membangun populisme. Populisme dan juga kepemimpinan yang kharismatik masih dinilai efektif untuk menggerakkan rakyat Indonesia berkaitan dengan suatu urusan atau kebijakan publik. Dalam hal ini jika berkaitan dengan membangun populisme, PDI-P dapat dikatakan lebih memiliki kapasitas dibandingkan dengan Kompip karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya, PDI-P memiliki

kader yang duduk di jabatan politik yang tentu saja dapat dengan mudah melakukan aksi-aksi populis. Hal itu tentu tidak dimiliki oleh Kompip sebagai lembaga representasi informal yang berada di luar kekuasaan formal.

Sementara itu, dalam hal teknis melakukan mobilisasi yang menghendaki adanya jaringan yang terbangun kuat antara aktor-aktor demokrasi, dalam hal ini Kompip dapat dikatakan lebih memiliki kapasitas. Advokasi dan pendidikan politik dijadikan instrumen utama dalam memobilisasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan khususnya masyarakat marginal di Kota Surakarta. Salah satu contoh kapasitas Kompip dalam melakukan mobilisasi ialah saat memobilisasi para pedagang di Banjarsari berdialog dan bernegosiasi dengan Pemerintah Kota untuk turut andil dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini Kompip Solo memiliki kapasitas dalam melakukan proses advokasi sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga, proses demokrasi lokal dalam hal ini berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam hal ini baik PDI-P dan Kompip keduanya memiliki kapasitas yang memadai. Namun, apabila berpijak dari populisme, PDI-P terlihat lebih memiliki kapasitas dikarenakan memiliki instrumen kader yang berada di jabatan politik sedangkan Kompip unggul dalam metode teknis mobilisasi yang mengedepankan advokasi dan pendidikan politik.

Kapasitas Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Representasi

Bagian ini dapat menjelaskan bahwa kedua lembaga representasi baik itu PDI-P dan Kompip mampu mendorong pemanfaatan beragam lembaga representasi yang ada sehingga mendorong partisipasi masyarakat. Semakin lembaga representasi yang ada mendorong masyarakat Surakarta untuk memanfaatkan lembaga representasi yang berbeda-beda tergantung berdasarkan urusan publiknya, maka lembaga representasi tersebut semakin memiliki kapasitas dalam. Temuan data dalam hal ini menunjukkan Kompip dapat dikatakan lebih memiliki kapasitas dibandingkan PDI-P. Kompip dapat memanfaatkan berbagai lembaga pengelola urusan publik tergantung persoalan publik yang di hadapinya.

Pada beberapa kasus, Kompip bekerjasama dengan Komnas HAM ketika mengawal isu HAM dan terkadang juga bernegosiasi dengan lembaga eksekutif ataupun legislatif. Hal tersebut berbeda dengan PDI-P yang praktis terlihat hanya memanfaatkan lembaga eksekutif saja ketika menghadapi persoalan publik. Wali kota selalu menjadi rujukan utama ketika masyarakat mengadu terkait persoalan yang dihadapinya ke PDI-P.

Lebih tingginya kapasitas Kompip Solo dalam variabel ini juga didukung oleh kecenderungan masyarakat Surakarta yang lebih memilih menyampaikan atau menyelesaikan masalahnya kepada lembaga

demokrasi informal dibandingkan dengan lembaga demokrasi formal. Preferensi masyarakat Surakarta tersebut dapat dicermati melalui tabel berikut: (PWD UGM, 2016).

Tabel 3.1

Institusi Publik yang Masyarakat Umum/Awam Percaya Dapat Menyelesaikan Masalahnya %	
Institusi	Respon
Organisasi mandiri	45
Institusi pelaksana sub-kontrak urusan public (Komisi Nasional, dll.)	30
Lembaga eksekutif/pemerintah	18
Birokrasi dan militer	3
Peradilan	3
Institusi pengelola urusan privat/swasta	0

Tabel 3.2

Mediator yang dipercaya Masyarakat Umum/Awam untuk Menyelesaikan Masalahnya	
Institusi Mediator	Respon
CSO	27
Media	22
Organisasi Kepentingan dan Isu	13
Masyarakat Politik	13
Partisipasi Individu Secara langsung	12
Pemimpin Informal	10
Cara memotong jalur representasi demokratis	0

Dari penjelasan terkait analisis kapasitas kedua lembaga representasi yaitu PDI-P dan Kompip kita dapat melihat bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan di masing-masing variabel.

PDI-P cenderung lebih memiliki kapasitas dalam hal yang terkait dengan populisme dan penciptaan agenda karena didukung dengan kepemilikan kepanjangan tangan baik di tataran eksekutif maupun legislatif. Sementara itu, Kompip lebih unggul dalam hal pendidikan politik dan juga membuka ruang dialog dalam proses perumusan kebijakan yang itu merupakan salah satu hal terpenting dalam demokrasi

dimana setiap warga negara memiliki hak politik yang setara.

Dalam beberapa kasus terkait pengelolaan urusan publik, kedua lembaga dapat membangun suatu hubungan kerjasama yang baik yaitu dalam upaya pemecahan masalah terkait relokasi pedagang di Banjarsari pada era pemerin-tahan Jokowi di Surakarta. Kompip dan PDI-P dalam hal ini saling terbuka dan bekerjasama dalam melibatkan masyarakat, sehingga relokasi besar berjalan damai dan menjadi salah satu percontohan di Indonesia bagaimana mengatasi urusan publik yang kerap menjadi sengketa. Pola hubungan seperti ini harusnya dapat terus dibangun dan dijalin di setiap pengelolaan urusan publik sehingga keberadaan kedua lembaga representasi tersebut baik formal maupun informal dapat mendorong proses demokratisasi di Surakarta.

Kesimpulan

Pada akhirnya kita dapat memahami bahwa membahas demokrasi tidak akan menjadi masuk akal jika tidak membahas lembaga representasi. Kemudian, akan menjadi semakin masuk akal dan bermanfaat apabila berbicara Partai Politik dan CSO sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi dengan cara dan metode yang berbeda.

PDI-P dan Kompip memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa perbedaan yang dimiliki keduanya ialah perbedaan yang tidak perlu disatukan, Partai

tidak perlu bertindak seperti CSO ataupun negara begitupun sebaliknya CSO tidak perlu merubah pendekatannya menjadi pendekatan yang dilakukan oleh Partai Politik. Dengan bahasa yang lain biarlah Partai Politik menjalankan fungsi representasinya dengan pendekatan politis sedangkan CSO menjalankan fungsi representasinya dengan pendekatan yang sifatnya teknokratik (pemberdayaan masyarakat, dll.)

Kedua lembaga tersebut bersifat saling melengkapi dengan perbedaan karakter dari kedua lembaga dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi (dalam hal ini terkait kaum marginal dan kaum miskin Kota). Jika dilihat melalui tipologi linkage diantara keduanya, hubungan keduanya bersifat komplementer (Levitsky, dkk, 2004). PDI-P sebagai masyarakat politik yang dalam penelitian ini dikategorisasi sebagai lembaga formal cenderung melakukan aksinya yang bersifat politis. Bergerak langsung menuju jantung kebijakan seperti Wali Kota Surakarta sebagai lembaga eksekutif di Surakarta adalah ciri khas yang dilakukan oleh PDI-P. Cara itu dilakukan karena dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan. Sementara itu, Kompip sebagai CSO menjalankan fungsinya dengan kapasitasnya sebagai lembaga representasi cenderung dengan aksi yang bersifat teknokratis. Pemberdayaan kepada kaum marginal dapat diakses dari berbagai saluran representasi dan juga berbagai institusi pengelola urusan publik. Di Surakarta hal tersebut ditekankan

oleh Kompip. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kerjasama yang sifatnya saling melengkapi dari kedua lembaga representasi dibutuhkan dalam konteks demokratisasi di Surakarta.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardianto, H. T. (2011). *Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta: Kritik Nalar 'Best Practices' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 15(2), 124-139.
- Arif, Akbarudin dan Baruno, Suryo. (2009). *Berguru Advokasi Kepada Forum Warga Solo*: Kompip.
- Detik.com. PDIP Masih Unggul di Solo, diakses melalui news.detik.com/berita/127210/pdip-masih-unggul-di-solo tanggal 25 Maret 2016.
- Diamond, L. J., & Morlino, L. (2004). An overview. *Journal of democracy*, 15(4), 20-31.
- Hanif, Hasrul dkk. (2013). *Survey Terhadap Pakar Tentang Demokrasi di Indonesia: Panduan Substansi*. Yogyakarta: PWD UGM dan University Of Oslo.
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). *Informal institutions and comparative politics: A research agenda*. *Perspectives on politics*, 2(4), 725-740.
- Huda, Eko. 2012. *Viva.co.id: Pengusuran Damai PKL Ala Satpol PP Solo*. Diakses melalui <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/279899-pesan-damai-dari-satpol-pp-solo> tanggal 1 April 2016.
- Kaho, Josef R. (2012). *Analisis Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: POLGOV UGM.
- KPU Surakarta. (2016). *Data diolah dari Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat*.
- Lay, C. (2013). *From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Solo, Indonesia*. In *Democratization in the Global South* (pp. 254-276). Palgrave Macmillan UK.
- Lay, C. (2017). *Political linkages between CSOs and parliament in Indonesia: a case study of political linkages in drafting the Aceh Governance Law*. *Asian Journal of Political Science*, 25(1), 130-150.
- Shiraishi, T., & Farid, H. (1977). *Zaman bergerak: radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*. Pustaka Utama Grafiti.
- Paskarina, Caroline dkk. (2015). *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Polgov UGM.
- Poltracking Indonesia. 2015. *Refleksi 17 Tahun Reformasi*, diakses 5 Februari 2016, dari www.poltracking.com.
- Presidenri.go.id. 2016. *Prioritas Kaum Marjinal*. Diakses melalui <http://presidenri.go.id/prioritas/kaum-marjinal.html> tanggal 23 Juni 2016.
- Rozaki, Abdur dkk. 2014. *Menuju Representasi Substantif: Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: IRE
- Savirani, Amalinda dkk. (2013). *Ringkasan Eksekutif Hasil Survei Demokrasi*. Yogyakarta: PWD UGM dan UiO
- Simanjuntak, B. A. (Ed.). (2013). *Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Sunaryo, Arie. 2014. www.merdeka.com: Megawati Kumpulkan Kader PDIP di Solo, diakses melalui <http://www.merdeka.com/politik/megawati-kumpulkan-kader-pdip-di-solo.html> tanggal 26 Maret 2016.
- Talkshow Kick Andy, Metro TV: 23 April 2016. Tim Peneliti Fisipol UGM. (2014). Laporan Penelitian Publik Distrust. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Törnquist, O. (2013). Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia. Springer.
- Törnquist, O., Webster, N., & Stokke, K. (Eds.). (2009). Rethinking popular representation. Springer.
- TribunSolo. 2016. <http://solotribunnews.com>: Aktivitas Unik Walikota Solo Saat Car Free Day. Diakses melalui <http://solo.tribunnews.com/2016/04/10/aktivitas-unik-wali-kota-solo-saat-car-free-day> tanggal 15 April 2016.
- Wawancara dengan Akbarudin Arif, Aktivistis Kompip Solo dan mantan Direktur Kompip Solo, tanggal 2 April 2016.
- Wawancara dengan Eko, Aktivistis Kompip Solo dan saat ini menjabat sebagai Direktur Kompip Solo, tanggal 12 April 2016. Wawancara dengan Putut Gunawan, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, DPC PDI-P Surakarta, tanggal 8 April 2016.
- www.erepublik.com. 2013. Kaum Marjinal Adalah Kita. Diakses melalui <http://www.erepublik.com/id/article/-sosialist-ids-kaum-marjinal-adalah-tanggungjawab-kita-2259034/1/20>.
- www.joglosemar.co 2015. Ini susunan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Solo yang Baru. Diakses melalui <http://joglosemar.co/2015/03/ini-susunan-pengurus-dpc-pdi-perjuangan-kota-solo-yang-baru.html> tanggal 26 Maret 2016.
- www.kbbi.web.id diakses tanggal 15 Januari 2016.
- www.pdiperjuangan.id, diakses melalui www.pdiperjuangan.id tanggal 26 Maret 2016.
- www.pwd.polgov.id, Data Compilation Surakarta, diakses tanggal 15 Januari 2016.
- www.surakarta.go.id, diakses tanggal 8 Maret 2016.